

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

Nur Aida^{1*}, Sudarman²

^{1,2} Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia

*Korespondensi: nuraidaaa28@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan melalui penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat khususnya untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan menentukan apakah pembangunan melalui dana otonomi khusus berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, yang menggunakan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah ke kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan dalam pengalokasian dana otsus untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi serta mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan dana otonomi khusus lebih kepada pengoptimalkan pembangunan pada pembangunan jembatan penghubung antar desa- desa terpencil dan pembangunan jalan akses desa yang berada di pedalaman atau desa- desa terpencil di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci : Kebijakan; Otonomi khusus; Pengelolaan.

ABSTRACT

Financial management through the use of special autonomy funds in West Aceh District in particular to optimize infrastructure development and determine whether development through special autonomy funds has a significant impact on development in West Aceh District, which uses special autonomy funds granted by the local government to districts/cities. This study aims to see how financial management is in allocating special autonomy funds to optimize infrastructure development in West Aceh District. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach, the steps taken are interviews, observations and collecting the necessary data. The results of the study show that West Aceh District in the management of special autonomy funds is more focused on optimizing development in the construction of connecting bridges between remote villages and the construction of access roads for villages located in remote areas or remote villages in West Aceh District.

Keywords : Policy; special autonomy; Management.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dapat membawa banyak perubahan yang positif di daerah dengan perpindahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintah daerah yang sentralistik untuk dapat mengatur urusan pemerintah daerah sendiri, berdasarkan inisiatif dan aspirasi dari rakyat dalam

suatu daerah yang diberikan otonomi khusus. (Desita et al., 2015) Terlebih dalam mengatur administrasi dan mengatur keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. (Mawikere et al., 2014) dimana salah satunya daerah diberikan kewenangan dan sumber keuangan untuk mendorong pembangunan nasional. (*Sumber Paper Kwn*, n.d.)

Pemberian status Otonomi khusus aceh di peroleh mealui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh diberlakukan. Pasal 183 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh memuat bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah aceh yang diberikan untuk membiayai pembangunan, terutama pembagunann dan pemeliharaan infratruster, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan. Dalam pasal 183 ayat (2) dana otonomi khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun perta ma sampai dengan tahun kelima belas sebesar 2% plafon DAU dan tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.(DPR RI, 2018).

Aceh menepati urutan ke enam dari presentasi tingkat kemiskinan tertinggi dengan presentase penduduk miskin sebesar 15,43 persen. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa dana otonomi khusus belum dapat menentaskan tingkat kemiskinan yang terjadi di aceh.(Adnan, 2021). Dana otonomi khusus yang di berikan untuk aceh mulai dari tahun 2001 yaitu untuk mesejahterakan masyarakat Aceh. (Akbar et al., 2021) dengan adanya pemberian status otonomi khusus, aceh juga di berikan dana alokasi untuk membiyai pembangunannya .(Putra, 2014)

Menurut (Seokanto) pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses terwujudnya tujuan. (Cruz, 2013) Maka dari itu menurut penulis pengelolaan merupakan suatu rangkaian suatu proses baik itu berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan.

Pengelolaan dana otonomi khusus membutuhkan anggaran yang berbasis kinerja di mana sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan, untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran otonomi khusus yang efektif dan efisien serta memperjelas tingkat penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.(Rofifah, 2020)

Dari penelitian (Cahyono, 2012) menjelaskan pengelolaan otonomi khusus Aceh di kategorikan masih belum optimal dalam pengelolaannya, dikarenakan jika dilihat dari bidang ekonomi belum berjalan dengan mestinya, hal ini membuat pembangunan Aceh yang belum merata, dan menyebabkan kesejahteraan rakyat aceh yang tidak meningkat. dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus Aceh masih belum merata pada bidang pengatasan kemiskinan.

Pada tahun anggaran 2019-2021 dana otonomi khusus di Kabupaten aceh Barat berfokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pada bidang ekenomi dan pengatasan kemiskinan masih sangat kecil.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kabupaten Aceh Barat dalam mengelola dana otonomi khusus dalam

mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Aceh Barat yang signifikan pada tahun 2019-2021.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi serta mengumpulkan data-data yang diperlukan. Menurut Sugiyono, Penelitian dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. (Sugiyono, 2016).

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran ataupun uraian secara detail dan sejelas mungkin tanpa ada objek yang dihilangkan terhadap penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah dengan wawancara yang tidak terstruktur yang mulai dengan pertanyaan umum dengan area yang luas, namun tetap fokus pada tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi aceh. Aceh memiliki luas wilayah 10.097.04 km² sebelum terjadinya pemekaran. Kemudian setelah terjadinya pemekaran luas wilayah kabupaten aceh barat menjadi 2.927,95 km² dan pada akhir tahun 2020 wilayah kabupaten aceh barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 198.736 jiwa.

Dana otonomi khusus adalah dana yang diberikan untuk membiayai program sesuai dengan prioritas provinsi Aceh, kemudian ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja aceh (APBA). Pemeberian dana otonomi khusus salah satunya bertujuan untuk pembangunan infratraktur.

Penyusunan dana otonomi khusus dari provinsi dan kemudian di salurkan kepada kabupaten/kota diberikan atas dasar nota kesepakatan antara Gebenor dan Bupati/walikota. Dalam pencairan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota diatur dalam peraturan gebenor dalam penyesuaian pencairan dana otonomi khusus oleh pusat. Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh Pasal 183 menyatakan bahwa dana otonomi khusus di prioritaskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengetasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, serta sosial dan kesehatan.

Berdasarkan paraturan Gebenor Aceh Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pembagian dan penyaluran belanja bantuan keuangan dana otonomi khusus aceh kepada pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021. Maka jumlah anggaran dana otonomi khusus yang di alokasikan dari pemerintahan daerah provinsi ke pemerintahan Kabupaten Aceh Barat untuk penggunaan pembangunan dapat dilihat dari tabel berikut.

Rekapitulasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Barat Untuk Pembangunan

	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021	Jumlah
Infrastruktur	53.280.094.255	49.634.197.200	59.368.100.188	162.282.391.643
Ekonomi	14.050.000.000	6.147.396.963		20.197.396.963
Budaya	38.355.754.681	39.051.628.165	31.967.438.563	109.374.821.409
	Total			291.854.610.015

Sumber : Diolah dari penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Barat dari tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021

Berdasarkan uraian dari tabel diatas, dana otonomi khusus lebih besar di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 162.282.391.643, selanjutnya pada bidang ekonomi pengalokasian anggaran sebesar Rp. 20.197.396.963, dan selajutnya pada bidang budaya anggaran yang diberikan sejumlah Rp. 109.374.821.409, dan dari tabel diatas dapat diliat bahwa pengalokasiann dana otsus lebih terfokus pada bidang infrastruktur.

Rekapitulasi Pengalokasian Anggaran Belanja Di Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2020

Program Kegiatan	Jumlah Aggaran
Pembagunaan jalan	Rp. 12.354.000.000,00
Pembangunan Jembatan	Rp. 28.000.198.200,00
Pembangunan rumah sehat sederhana	Rp. 7.225.000.000,00
Pengadaan Armada Pemadam Kebakaran	Rp. 1.500.000.000,00
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	Rp. 1.000.000.000,00

Sumber : BPKD Aceh Barat (Diolah dari penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020)

Berdasarkan tabel realisasi anggaran 2020 terdapat bahwa realisasi pengalokasian anggaran dana otonomi anggaran terhadap pembangunan khusus kabupaten Aceh Barat pada tahun infrastruktur pada pembagunan jalan,

pembangunan jembatan, Pembagunan rumah sehat sederhana, Pengadaan Armada Pemadam Kebakaran, dan Pembagunan Pos Pemadam Kebakaran.

Perencanaan dimulai dari rencana kerja dari perangkat daerah untuk jangka waktu satu tahun oleh kabupaten Aceh Barat. Adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan pengelolaan dana otonomi khusus kabupaten Aceh Barat menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan penyaluran dana otsus dengan peraturan yang telah dibuat.

Proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana otonomi khusus pada Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pada peraturan Gebenur dan Bupati. Dari itu menunjukan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus di kabupaten Aceh Barat sesuai dengan peraturan Gebenur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan penyaluran Belanja Bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota Se-Provisi Aceh tahun anggaran 2021. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semua kegiatan yang didanai oleh otsus pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dana otsus di kabupaten Aceh Barat lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan fasilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di pelosok terpencil dan pembagunan infrasturtur tangam bencana seperti posko pemadam kebakaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adnan. (2021). Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2019. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 11(2), 103–109.
- Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas*, 7(1), 101–120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Cahyono, H. (2012). No Title. *Jurnal Peneliti Politik*, 9(EVALUASI ATAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS ACEH: GAGAL MENYEJAHTERAKAN RAKYAT DAN SARAT KONFLIK INTERNAL), 6. <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.227>
- Cruz, A. P. S. (2013). Konsep Pengelolaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Desita, P. N., Kirmizi, & Ali, A. A. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010-2014). *Jom FEKON*, 2(2), 1–13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFEKON/article/view/8209
- DPR RI. (2018). Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. *Dpr.Go.Id*. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara>
- Mawikere, L., Morasa, J., & Tamboto, L. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa

- Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 755–767.
- Putra, E. J. (2014). Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 421–435.
- Rofifah, D. (2020). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus. *Unimal Press*, 12–26.
- Sugiyono, prof. D. (2016). No Title. In *metode penelitian, kualitatif dan R&D*. PT Alfabert. *Sumber Paper Kwn*. (n.d.).